

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

# Zonasi Tiap Kecamatan Hindari Penerima Ganda

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyepakati distribusi bantuan sosial dibagi per zona kecamatan. Mekanisme itu diyakini membuat pendistribusian bantuan tahap kedua bisa lebih terkendali.

Dalam rilis resmi Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Minggu (9/5/2020), disebutkan, Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungan di Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, menjelaskan pembagian zona per kecamatan untuk pembagian bansos dari Presiden dan bansos Pemprov DKI Jakarta.

"Agar tidak tumpang tindih, sudah disepakati antara Wagub DKI dan Mensos agar dibagi per zona kecamatan. Jadi ada kecamatan tertentu yang menerima jatah dari DKI dan kecamatan lain menerima jatah dari Kemensos," katanya.

Langkah itu akan direalisasikan pada pekan ketiga Mei.

Jhonny Simanjuntak, Sekre-

taris Komisi E DPRD DKI Jakarta Bidang Kesejahteraan Sosial, menyatakan, model distribusi per zona akan saling membantu, baik bansos Presiden ataupun DKI Jakarta. "Namun, sebelum diterapkan, Pemprov DKI Jakarta harus memperbaiki dan merapikan data penerima," kata Simanjuntak.

## Anggota dewan dapat

Itu penting karena dalam distribusi bansos DKI tahap pertama, selain karut marut, juga terjadi salah sasaran. Ada anggota DPRD dan warga mampu yang malah dapat bantuan. Pada tahap I, warga rentan miskin belum masuk dalam data penerima.

Merry Hotma, anggota Komisi E dari Fraksi PDI-P menilai, pendistribusian dengan zonasi diharapkan bisa terkendali. Untuk perbaikan data, ia minta Pemprov DKI Jakarta melibatkan anggota Dewan. "Dengan konstituen yang kami miliki, kami bisa membantu verifikasi data untuk lebih aku-

rat," kata Merry.

## Bantuan disamakan

Jenis bansos dari Presiden yang akan diberikan di tahap dua berupa beras Bulog 25 kg per keluarga. Penerima dipastikan termasuk para pendatang, terutama pekerja harian, pengemudi ojek, pelaku UMKM, dan pedagang kecil yang tak bisa jualan akibat PSBB.

Menurut Merry, isi bansos sebaiknya disamakan untuk menghindari kecemburuan. Itu karena warga yang menerima bansos dari DKI Jakarta bisa bervariasi, bukan hanya beras, sedangkan bansos Presiden hanya berupa beras.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazarudin mengatakan, banpres tahap pertama selesai pekan lalu. Bentuknya berupa paket kebutuhan pokok senilai Rp 600.000.

Saat ini, para lurah di DKI Jakarta masih menanti datangnya bantuan. Setiyawan, Lurah Kampung Melayu, Jakarta Ti-

mur, mengatakan, kabar masih simpang siur. "Ada yang bilang bansos Pemprov DKI akan datang Minggu ini, tetapi belum ada konfirmasi," ujarnya.

Di Kota Bekasi, Jawa Barat, warga juga masih menanti bansos pemerintah. Sejauh ini, bantuan yang selesai didistribusikan dari Pemkot Bekasi.

Nurlaeli (40), warga RT 003 RW 001 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, mengatakan hampir sebulan menanti bansos pemerintah. Namanya juga sudah didaftarkan pengurus RW sebagai warga terdampak Covid-19.

"Tetangga saya sudah dapat semua. Katanya nama saya masuk jatah bansos dari pusat," kata pedagang kaki lima itu.

Ketua RW 001 Kelurahan Sumur Batu, Kiman, mengatakan, bantuan yang belum tiba dari pusat dan Pemprov Jabar.

Namun, di Kelurahan Jatimekar, distribusi bansos lancar, termasuk dari Provinsi Jabar. Kalau dari pemerintah pusat, masih proses. (HLN/DNE/VAN)